



**PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BADAN
PERADILAN UMUM
MAHKAMAH AGUNG RI
TAHUN 2015**



Dirangkum dan disajikan oleh:

Jeanny HV Hutauruk, S.E., M.M., Ak., C.A.

Ketua Tim Sekretariat dan Tim Kelompok Kerja Asessor RB MA-RI

SK SEKMA MA-RI No : 23/SEK/SK/IV/2016, 25 April 2016

REFORMASI BIROKRASI

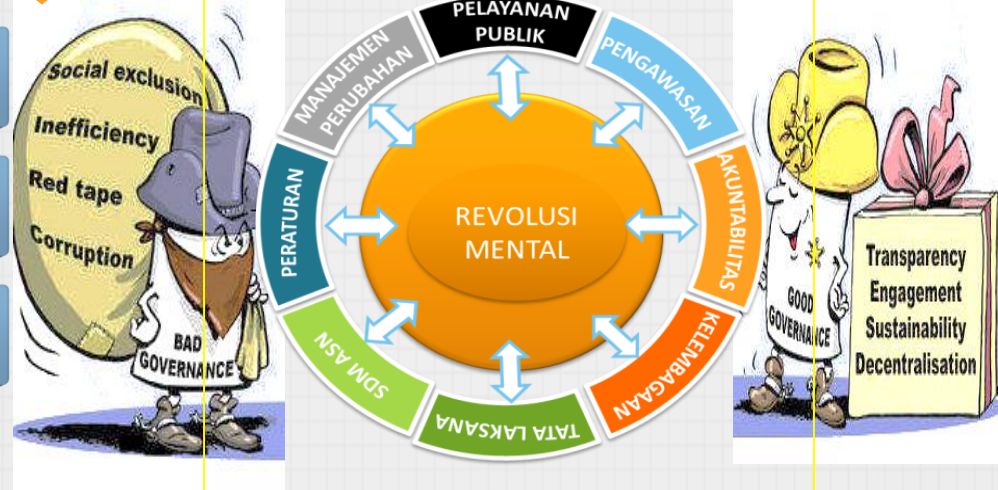


Reformasi Birokrasi adalah upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business proses) dan sumber daya manusia (aparatur).

Sasaran Reformasi Birokrasi



8 Area Perubahan



- Maraknya KKN
- Buruknya Pelayanan Publik
- Rendahnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja

- Bersih dari KKN
- Pelayanan Publik Berkualitas
- Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Tinggi

- MENDORONG PELAKSANAAN**
- EVALUASI**
1. REFORMASI BIROKRASI
 2. ZONA INTEGRITAS
 3. AKUNTABILITAS KINERJA

Langkah-langkah Reformasi Birokrasi

Mendapatkan komitmen pimpinan yang kuat

Melibatkan seluruh pemangku kepentingan

Membentuk tim reformasi birokrasi

Menetapkan Road Map (8 Area Perubahan)

Menerapkan manajemen berbasis kinerja

Menginformasikan upaya dan hasil secara berkala, termasuk *quick wins*

Melaksanakan monitoring dan evaluasi (PMPRB)

Menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi



Kerangka Logis Evaluasi RB (Internal dan Eksternal)



PENGUNGKIT (60%)

5

**Manajemen
Perubahan**

15

**Penataan Sistem
Manajemen SDM**

5

**Penataan Peraturan
Perundang-
undangan**

6

**Penguatan
Akuntabilitas**

6

**Penataan dan
Penguatan
Organisasi**

12

**Penguatan
Pengawasan**

5

**Penataan
Tatalaksana**

6

**Peningkatan Kualitas
Pelayanan Publik**

HASIL (40)

Kapasitas dan
Akuntabilitas
Kinerja
Organisasi (20)

- Nilai Akuntabilitas Kinerja (14)
- Nilai Kapasitas Organisasi (Survei Internal) (6)

Pemerintah yang
Bersih dan Bebas
KKN
(10)

- Nilai Persepsi Korupsi (Survei Eksternal) (7)
- Opini BPK (3)

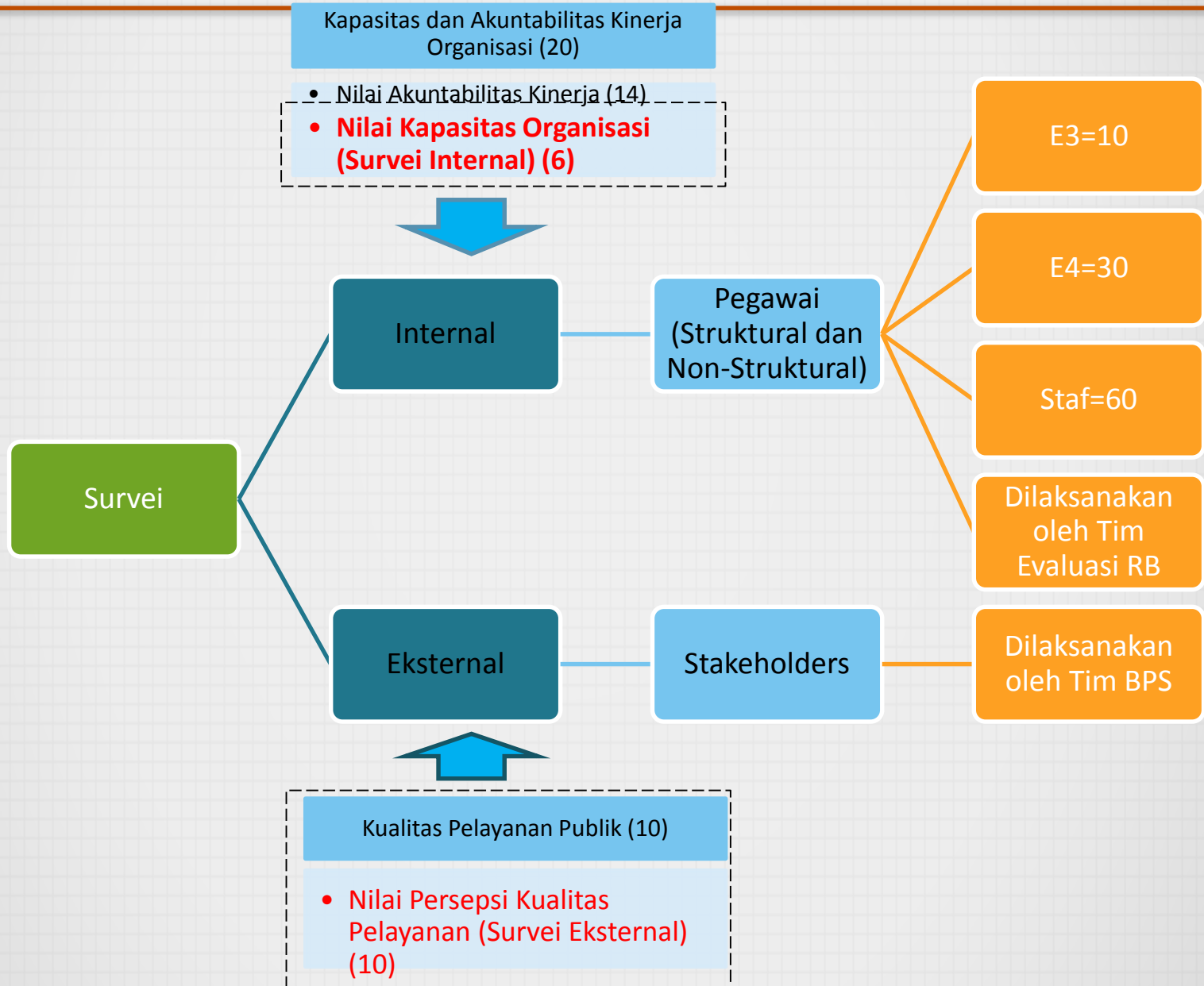
Kualitas
Pelayanan Publik
(10)

- Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal) (10)

Metodologi Evaluasi

1. Evaluasi Dokumen
2. Wawancara
3. Survei (Kuesioner)
4. Observasi Lapangan

Pelaksanaan Survei





Pasal 24 Ayat 2 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

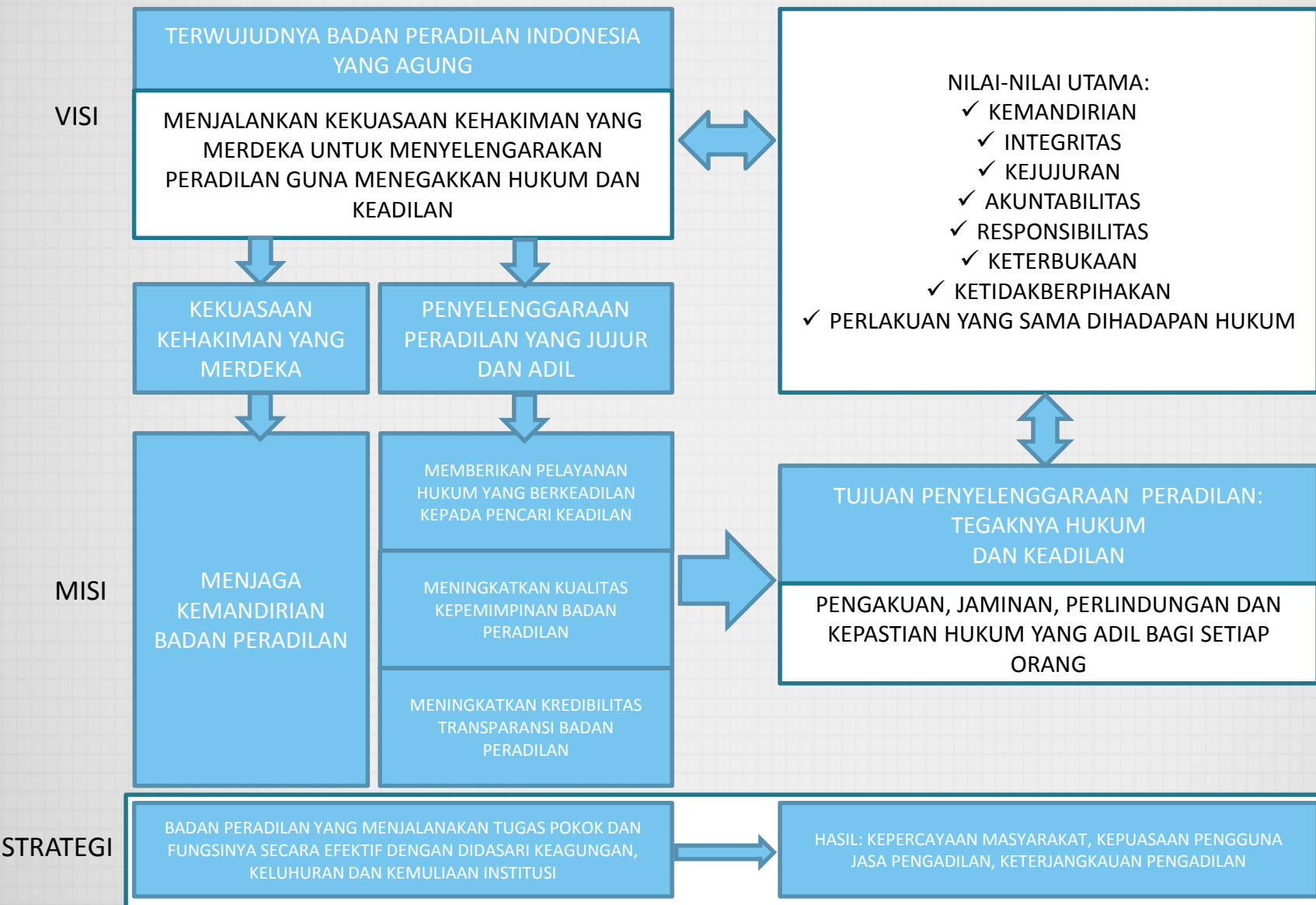


Pasal 24A Ayat 1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945



Pasal 24C Ayat 3 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

VISI, MISI DAN NILAI-NILAI UTAMA BADAN PERADILAN



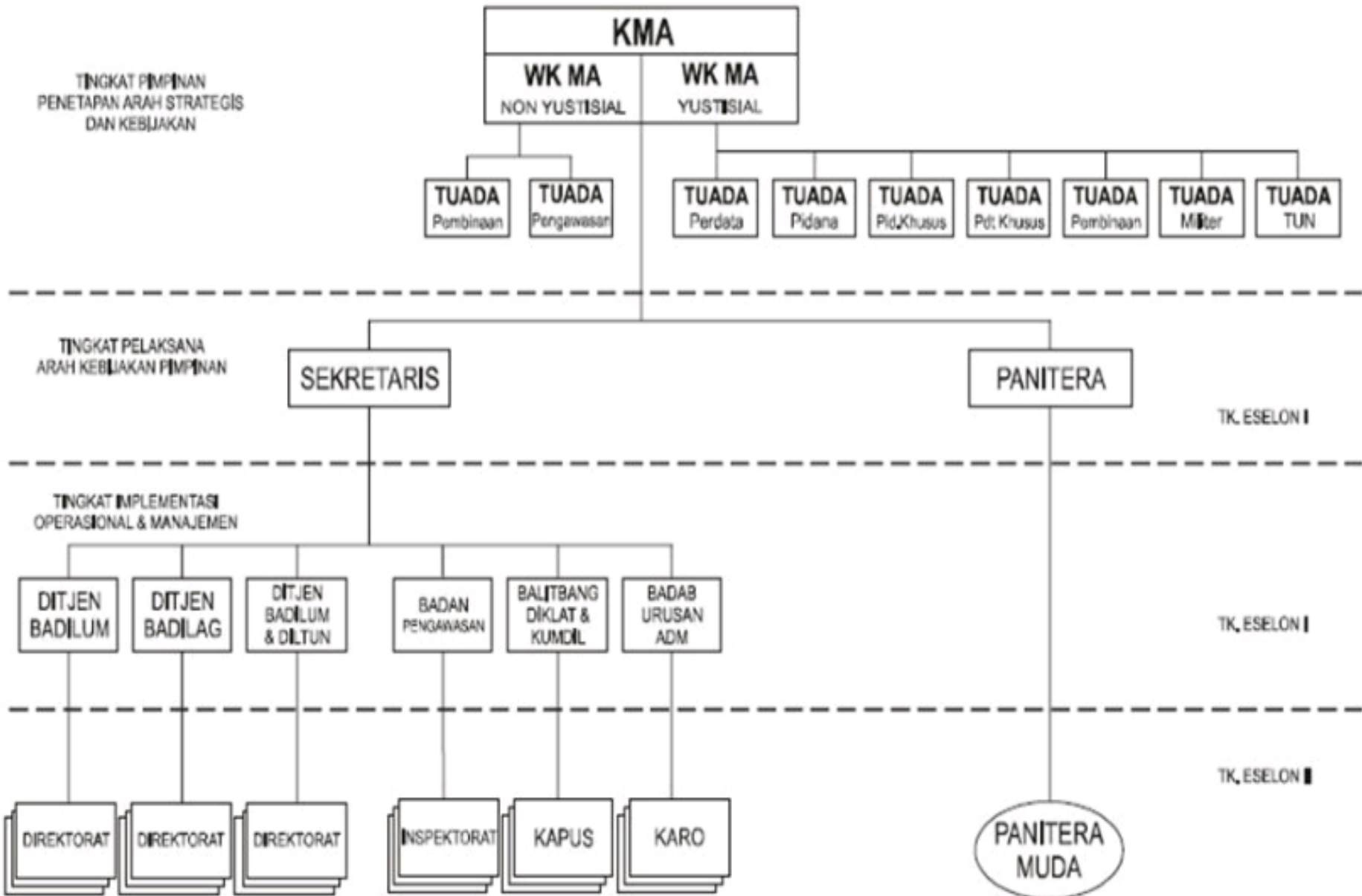


**Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005
Tentang Sekretariat Mahkamah Agung**



**Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung
Nomor : MA/SEK.07/SK/III/2006 Tentang
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat
Mahkamah Agung RI**

STRUKTUR ORGANISASI MAHKAMAH AGUNG RI



Fungsi Peradilan

- Sebagai pengadilan negara tertinggi
- Memeriksa dan memutuskan perkara pada tingkat pertama dan terakhir.
- Hak Uji Materiil terhadap Peraturan Perundangan dibawah Undang-Undang.

Fungsi Pengawasan

- Melakukan pengawasan tertinggi terhadap jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan.
- Mengawasi tingkah laku para hakim dan perbuatan pejabat pengadilan dalam menjalankan kekuasaan kehakiman.

Fungsi Mengatur

- Mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan .
- Membuat Peraturan Acara Sendiri Bilamana Dianggap Perlu

Fungsi Nasihat

- Memberikan Nasihat atau Pertimbangan Hukum Kepada Lembaga Tinggi Negara
- Berwenang Meminta Keterangan Dari Dan Memberi Petunjuk Kepada Pengadilan Di Semua Lingkungan Peradilan

Fungsi Administratif

- Mengatur Secara Organisatoris, Administratif dan Finansial Terhadap 4 (empat) Lingkungan Badan Peradilan
- Mengatur Tugas Serta Tanggung Jawab, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Pengadilan

Fungsi Lain-Lain

- Mahkamah Agung Diserahi Tugas dan Wewenang Lain Berdasarkan Undang-Undang (Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Serta Pasal 38 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985)

RENSTRA MAHKAMAH AGUNG RI

TUJUAN

- Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
- Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi.
- Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
- Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.

SASARAN

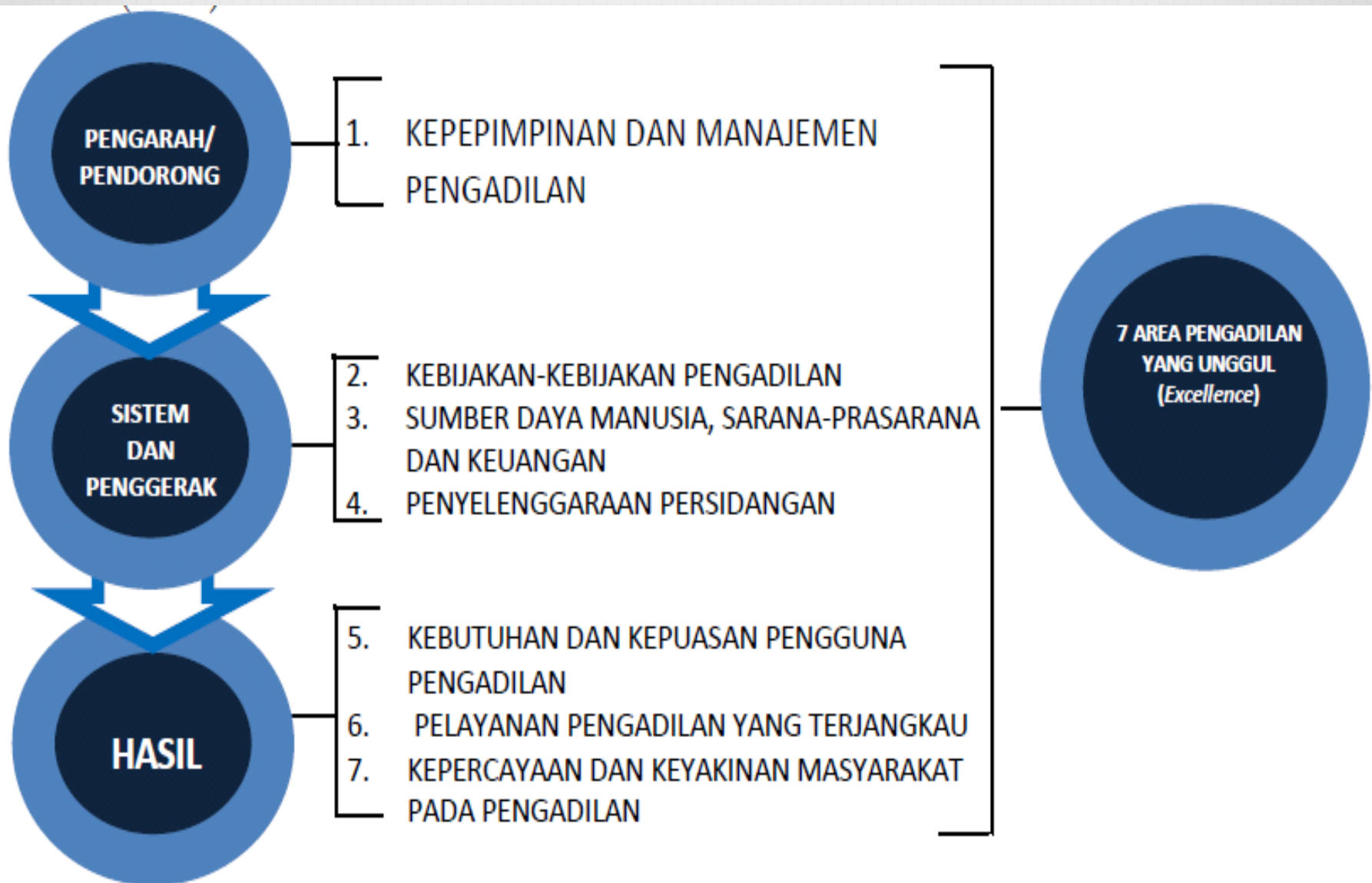
- Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
- Meningkatkan penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi.
- Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
- Terwujudnya sistem manajemen informasi yang terintegrasi dan menunjang sistem peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel.
- Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal.
- Terwujudnya transparansi pengelolaan SDM lembaga peradilan berdasarkan parameter obyektif.
- Meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara akuntabel, efektif dan efisien.

LAPORAN REALISASI ANGGARAN MA RI TA 2015

18

NO	UNIT ESELON I	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%	SISA ANGGARAN (Rp)	%
1	(005.01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI	8.071.689.023.000	7.478.040.512.719	92,65%	593.648.510.281	7,35%
	- ESELON I PUSAT	2.348.737.639.000	2.053.270.547.956	87,42%	295.467.091.044	12,58%
	- DAERAH	5.722.951.384.000	5.424.769.964.763	94,79%	298.181.419.237	5,21%
2	(005.02) KEPANITERAAN	164.772.400.000	156.067.038.261	94,72%	8.705.361.739	5,28%
3	(005.03) DITJEN BADAN PERADILAN UMUM	121.619.500.000	116.152.102.847	95,50%	5.467.397.153	4,50%
	- ESELON I PUSAT	68.854.886.000	65.875.854.933	95,67%	2.979.031.067	4,33%
	- DAERAH	52.764.614.000	50.276.247.914	95,28%	2.488.366.086	4,72%
4	(005.04) DITJEN BADAN PERADILAN AGAMA	75.039.500.000	73.992.327.732	98,60%	1.047.172.268	1,40%
	- ESELON I PUSAT	50.554.100.000	50.078.884.775	99,06%	475.215.225	0,94%
	- DAERAH	24.485.400.000	23.913.442.957	97,66%	571.957.043	2,34%
5	(005.05) DITJEN BADAN PERADILAN MILITER DAN TUN	23.249.700.000	21.829.171.849	93,89%	1.420.528.151	6,11%
	- ESELON I PUSAT	17.977.346.000	17.161.938.081	95,46%	815.407.919	4,54%
	- DAERAH	5.272.354.000	4.667.233.768	88,52%	605.120.232	11,48%
6	(005.06) BADAN PENGAWASAN	30.072.600.000	29.599.528.974	98,43%	473.071.026	1,57%
7	(005.07) BADAN LITBANG DIKLAT KUMDIL	89.555.200.000	83.060.596.880	92,75%	6.494.603.120	7,25%
	JUMLAH	8.575.997.923.000	7.958.741.279.262	92,80%	617.256.643.738	7,20%

BLUEPRINT MA RI



STRUKTUR ORGANISASI DITJEN BADILUM

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM



TUPOKSI DITJEN BADILUM

TUGAS

Membantu sekretaris Mahkamah Agung dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang pembinaan tenaga teknis, pembinaan administrasi peradilan, pranata dan tata laksana perkara di lingkungan peradilan umum pada mahkamah agung dan pengadilan di lingkungan peradilan umum.

FUNGSI

1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembinaan tenaga teknis, pembinaan administrasi peradilan, pranata dan tata laksana perkara di lingkungan peradilan umum.
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan tenaga teknis, pembinaan administrasi peradilan, pranata dan tata laksana perkara di lingkungan peradilan umum.
3. Perumusan standar, norma, kriteria dan prosedur di bidang pembinaan tenaga teknis, pembinaan administrasi peradilan, pranata dan tata laksana perkara di lingkungan peradilan umum.
4. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi
5. Pelaksana administrasi direktorat jenderal

VISI MISI DITJEN BADILUM

VISI : Terwujudnya Kemandirian Peradilan Umum yang Agung.

MISI :

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Tenaga Teknis menjadi aparatur yang berkualitas dan profesional di bidangnya.

2. Meningkatkan akses pelayanan di bidang administrasi peradilan umum kepada masyarakat.

TUJUAN STRATEGIS DITJEN BADILUM

Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Tenaga Teknis menjadi aparatur yang berkualitas dan profesional di bidangnya.

Meningkatkan akses pelayanan di bidang administrasi peradilan umum kepada masyarakat.

SASARAN STRATEGIS DITJEN BADILUM

12

Peningkatan Kinerja Sumber Daya Manusia (SDM) Peradilan Umum.

Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.

RENSTRA DITJEN BADILUM

TUJUAN

- Peningkatan Tertib Administrasi
- Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam rangka mewujudkan aparatur hukum yang professional,

SASARAN

- Kelengkapan berkas Perkara Kasasi Pidana, Peninjauan Kembali dan Grasi
- Laporan Perkara yang tepat waktu.
- Pengelolaan sarana dan prasarana.
- Pengembangan model Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).
- Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) Tenaga Teknis Peradilan Umum dengan memberikan reward atau punishment.
- Peningkatan kemampuan Tenaga Teknis Peradilan Umum melalui penyelenggaraan Bimbingan Kerja, yang bersifat teknis dan bersifat administratif.

AKUNTABILITAS KEUANGAN DITJEN BADILUM T.A. 2014

26

No.	UNIT	PAGU	REALISASI	%
1	Sekretariat Ditjen	28.437.232.000	27.127.419.747	95,39
2	Dit Binganis Dilum	25.048.208.000	24.993.174.723	99,78
3	Dit Pembinaan Adm Dilum	986.515.000	977.458.516	99,08
4	Dit Pratalakra Perdata	697.410.000	685.560.477	98,30
5	Dit Pratalakra Pidana	798.110.000	778.733.050	97,57
	Jumlah	55.967.475.000	54.562.346.513	97,49

AKUNTABILITAS KEUANGAN DITJEN BADILUM T.A. 2015

27

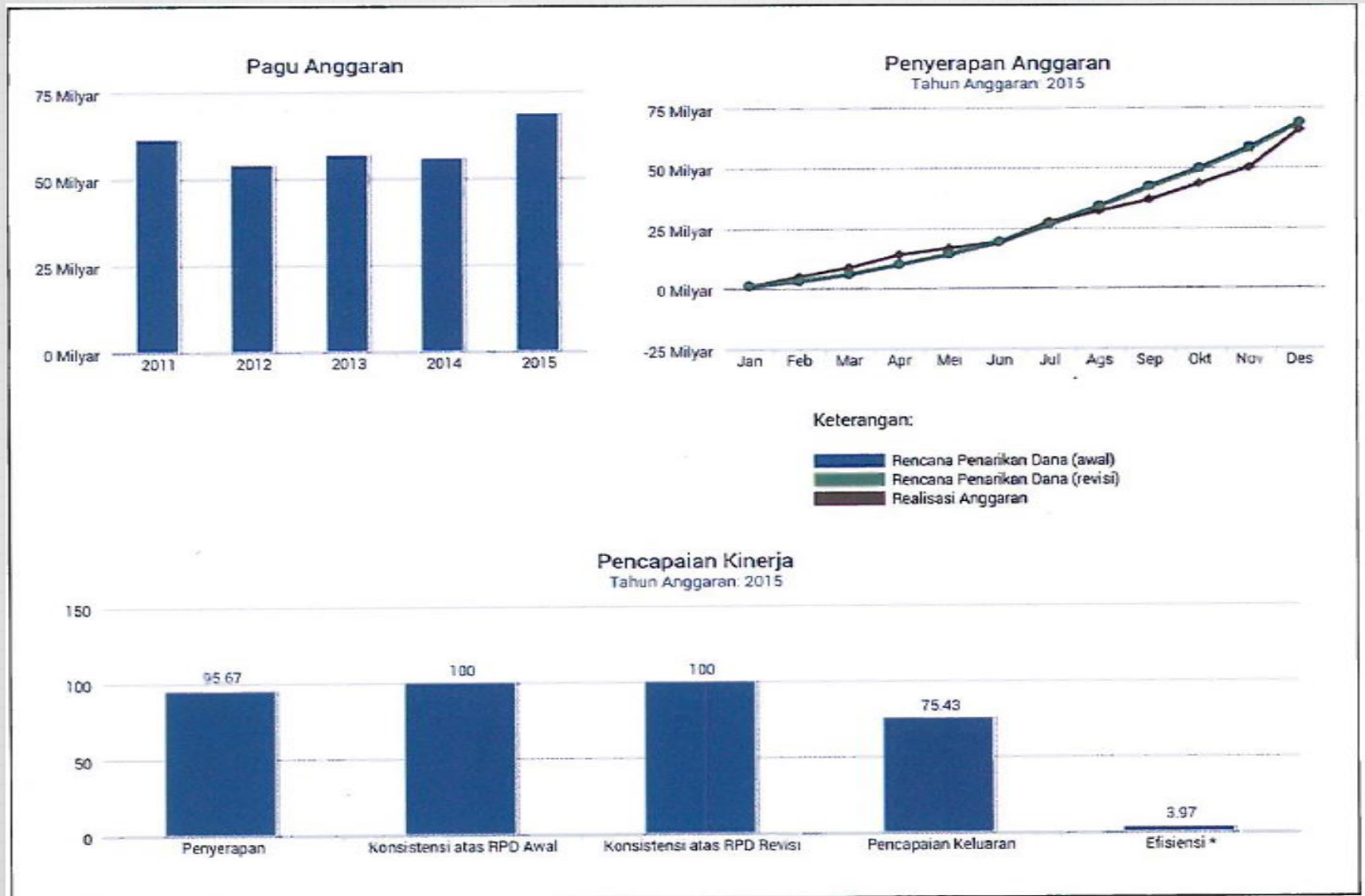
No.	NAMA KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%	TARGET	REALISASI
1	Pengembangan Tenaga Teknis Peradilan Umum	31.770.496.000	29.882.380.863	94,06	100%	100%
2	Peningkatan Ketatalaksanaan Perkara Perdata Kasasi dan PK	795.284.000	780.956.182	98,20	100%	100%
3	Peningkatan Ketatalaksanaan Perkara Pidana Kasasi	805.582.000	769.006.340	95,46	100%	100%
4	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	58.333.241.000	55.598.403.449	95,31	100%	100%

AKUNTABILITAS KEUANGAN DITJEN BADILUM T.A. 2015

28

No.	NAMA KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%	TARGET	REALISASI
5	Pengembangan Kebijakan Peradilan Umum	197.000.000	181.892.100	92,33	100%	100%
6	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Badilum	29.717.894.000	28.606.746.905	96,26	100%	100%
Jumlah		121.619.500.000	115.189.385.839	96,26	100%	100%

Capaian Kinerja Badilum Berdasar Monev Kemenkeu



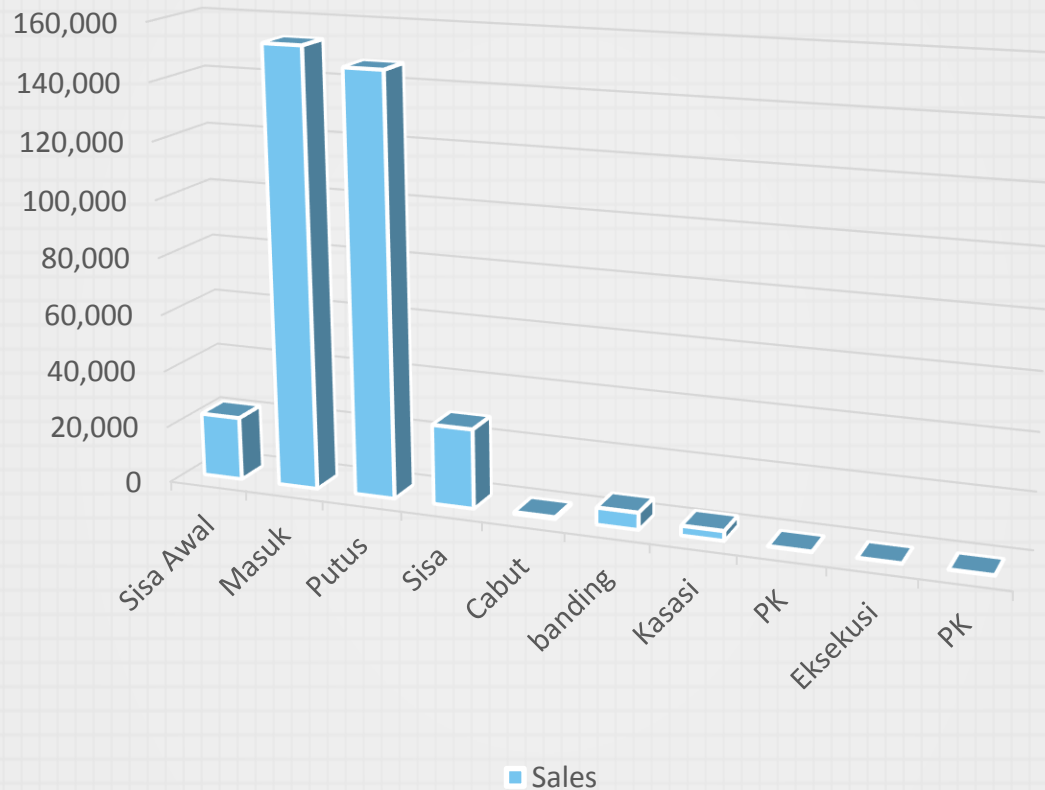
Statistik Perkara Perdata Pengadilan Negeri dalam Pengadilan Tinggi Tahun 2015

Jenis Perkara Perdata	Sisa Awal	Masuk	Putus	Sisa Akhir	Cabut	BD	KS	PK
Gugatan	10.905	28.403	23.245	12.340	3.723	5.417	3.017	243
Permohonan	1.213	31.554	28.367	2.085	2.315	0	16	1

Statistik Perkara Pidana Pengadilan Negeri dalam Pengadilan Tinggi Tahun 2015

Jenis Pidana	Sisa Awal	Masuk	Putus	Sisa Akhir	Cabut	BD	KS	PK	Eks ekusi	PK
Pidana Umum	20.765	144.206	138.830	26.139	-	4.959	2.577	80		12
Pidana Korupsi	869	2.456	2.249	1.076	0	635	331	3		
Pidana Anak	213	4.584	4.234	563	-	340	162	0		0
PHI	384	1.539	1.180	187	556	0	227	20	-	-
Perkara Niaga	71	355	258	111	57	0	58	4	-	-
Perkara Perikanan	8	175	159	0	24	40	10	0	-	-

Grafik Perkara Pidana Pengadilan Negeri dalam Pengadilan Tinggi Tahun 2015



Rincian Rasio Produktivitas Memutus dan Sisa Perkara Tahun 2015

JENIS PERKARA	SISA 2014	MASUK	JUNLAH BEBAN	PUTUS	SISA	% PUTUS v BEBAN	% SISA v BEBAN
Perdata	2.232	4.271	6.503	4.823	1.680	74,17%	25,83%
Perdata Khusus	274	979	1.253	1.012	241	80,77%	19,23%
Pidana	586	1.867	2.453	1.959	494	79,86%	20,14%
Pidana Khusus	844	3.262	4.106	3.073	1.033	74,84%	25,16%
Perdata Agama	18	962	980	979	1	99,90%	0,10%
Pidana Militer	38	349	387	299	88	77,26%	22,74%
Tata Usaha Negara	433	2.287	2.720	2.307	413	84,82%	15,18%
Jumlah	4.425	13.977	18.402	14.452	3.950	78,53%	21,47%

Data Keadaan Perkara MA RI Periode 2004-2015

No	Tahun	Sisa Tahun Lalu	Masuk Tahun ybs	Jumlah ditangani	Putus	Sisa Akhir	% sisa vs beban
1	2004	20.825	5.730	26.555	6.241	20.314	76,50%
2	2005	20.314	7.468	27.782	11.807	15.975	57,50%
3	2006	15.975	7.825	23.800	11.775	12.025	50,53%
4	2007	12.025	9.516	21.541	10.714	10.827	50,26%
5	2008	10.827	11.338	22.165	13.885	8.280	37,36%
6	2009	8.280	12.540	20.820	11.985	8.835	42,44%
7	2010	8.835	13.480	22.315	13.891	8.424	37,75%
8	2011	8.424	12.990	21.414	13.719	7.695	35,93%
9	2012	7.695	13.412	21.107	10.995	10.112	47,91%
10	2013	10.112	12.337	22.449	16.034	6.415	28,58%
11	2014	6.415	12.511	18.926	14.501	4.425	23,38%
12	2015	4.425	13.977	18.402	14.452	3.950	21,66%

HAMBATAN: #perubahan MINDSET

SEMUA
PEGAWAI

- MOTIVASI

SEMUA
PEGAWAI

- KOMITMEN

REFORMASI BIROKRASI 2014-2013



PENGUNGKIT:46,06
(26,73)

HASIL : 27,08
(21,59)

TOTAL : 73,14
(48,33)

HASIL LKE PMPRB MA RI APRIL 2016

No	Komponen Penilaian	Nilai Maksimal	Nilai Capaian	% Capaian
A	Pengungkit			
1	Manajemen Perubahan	5,00	4,84	96,79%
2	Penataan Peraturan Perundang-undangan	5,00	5,00	100%
3	Penataan dan Penguatan Organisasi	6,00	6,00	100%
4	Penataan Tatalaksana	5,00	5,00	100%
5	Penataan Sistem Manajemen SDM	15,00	14,89	99,27%
6	Penguatan Akuntabilitas	6,00	6,00	100%
7	Penguatan Pengawasan	12,00	11,50	95,84%
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	6,00	6,00	100%
	Sub Total Komponen Pengungkit	60,00	59,23	98,71%

HASIL LKE PMPRB MA RI APRIL 2016

No	Komponen Penilaian	Nilai Maksimal	Nilai Capaian	% Capaian
B	Hasil			
1	Kapasitas Dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	20,00	14,00	0,69961%
2	Pemerintah Yang Bersih Dan Bebas KKN	10,00	7,20	72%
3	Kualitas Pelayanan Publik	10,00	7,60	76%
	Sub Total Komponen Hasil	40,00	28,80	0,719805%
	Indeks Reformasi Birokrasi	100,00	88,03	88%

ELEMEN REFORMASI BIROKRASI MA

Manajemen Perubahan;

Penataan Peraturan Perundang-undangan;

Penataan dan Penguatan Organisasi;

Penataan Tata Laksana;

Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur;

Penguatan Pengawasan;

Penguatan Akuntabilitas Kinerja;

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

ELEMEN REFORMASI BIROKRASI MA

PROGRAM	PENJELASAN
Manajemen Perubahan	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="795 401 1831 511">1. Telah membentuk Tim Reformasi Birokrasi sesuai kebutuhan organisasi.<li data-bbox="795 525 1831 701">2. Tim Reformasi Birokrasi telah melaksanakan tugas sesuai rencana kerja Tim Reformasi Birokrasi<li data-bbox="795 715 1831 891">3. Tim Reformasi Birokrasi telah melakukan monitoring dan evaluasi rencana kerja, dan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti<li data-bbox="795 905 1831 958">4. Road Map telah disusun dan diformalkan.<li data-bbox="795 972 1831 1086">5. Road Map telah mencakup 8 area perubahan (minimal 4 Area)<li data-bbox="795 1100 1831 1153">6. Road Map telah mencakup "quick win"<li data-bbox="795 1168 1831 1272">7. Penyusunan Road Map telah melibatkan seluruh unit organisasi.

ELEMEN REFORMASI BIROKRASI MA

PROGRAM	PENJELASAN
Manajemen Perubahan	<ol style="list-style-type: none">8. Telah terdapat sosialisasi/internalisasi Road Map kepada anggota organisasi.9. PMPRB telah direncanakan dan diorganisasikan dengan baik.10. Aktivitas PMPRB telah dikomunikasikan pada masing-masing unit kerja.11. Telah dilakukan pelatihan yang cukup bagi Tim Asesor PMPRB.12. Pelaksanaan PMPRB dilakukan oleh Asesor sesuai dengan ketentuan yang berlaku.13. Apakah koordinator asesor PMPRB melakukan reviu terhadap kertas kerja asesor sebelum menyusun kertas kerja instansi?

ELEMEN REFORMASI BIROKRASI MA

PROGRAM	PENJELASAN
Manajemen Perubahan	<ol style="list-style-type: none">14. Apakah para asesor mencapai konsensus atas pengisian kertas kerja sebelum menetapkan nilai PMPRB instansi?15. Rencana aksi tindak lanjut (RATL) telah dikomunikasikan dan dilaksanakan.16. Terdapat keterlibatan pimpinan tertinggi secara aktif dan berkelanjutan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi.17. Terdapat media komunikasi secara reguler untuk menyosialisasikan tentang reformasi birokrasi yang sedang dan akan dilakukan.18. Terdapat upaya untuk menggerakkan organisasi dalam melakukan perubahan melalui pembentukan agent of change ataupun role model.

ELEMEN REFORMASI BIROKRASI MA

PROGRAM	PENJELASAN
Penataan Peraturan Perundang-Undangan	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="795 401 1837 639">1. Telah dilakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap seluruh peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/sinkron.<li data-bbox="795 654 1837 829">2. Telah dilakukan revisi peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis / tidak sinkron.<li data-bbox="795 843 1837 1143">3. Adanya Sistem pengendalian penyusunan peraturan perundangan yang mensyaratkan adanya Rapat Koordinasi, Naskah Akademis/kajian/policy paper, dan Paraf Koordinasi<li data-bbox="795 1158 1837 1333">4. Telah dilakukan evaluasi atas pelaksanaan sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan

ELEMEN REFORMASI BIROKRASI MA

PROGRAM	PENJELASAN
Penataan dan Penguatan Organisasi	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="794 401 1835 539">1. Telah dilakukan evaluasi untuk menilai ketepatan fungsi dan ketepatan ukuran organisasi kepada seluruh unit organisasi.<li data-bbox="794 554 1835 644">2. Telah dilakukan evaluasi yang mengukur jenjang organisasi.<li data-bbox="794 658 1835 748">3. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan duplikasi fungsi.<li data-bbox="794 762 1835 896">4. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis satuan organisasi yang berbeda tujuan namun ditempatkan dalam satu kelompok.<li data-bbox="794 911 1835 1045">5. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan adanya pejabat yang melapor kepada lebih dari seorang atasan.<li data-bbox="794 1059 1835 1193">6. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kesesuaian struktur organisasi dengan kinerja yang akan dihasilkan.<li data-bbox="794 1208 1835 1300">7. Telah dilakukan evaluasi atas kesesuaian struktur organisasi dengan mandat.

ELEMEN REFORMASI BIROKRASI MA

PROGRAM	PENJELASAN
Penataan dan Penguatan Organisasi	<ol style="list-style-type: none">8. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan tumpang tindih fungsi dengan instansi lain.9. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemampuan struktur organisasi untuk adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis.10. Hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dengan mengajukan perubahan organisasi.
Penataan Tata Laksana	<ol style="list-style-type: none">1. Telah memiliki peta proses bisnis yang sesuai dengan tugas dan fungsi.2. Peta proses bisnis sudah dijabarkan ke dalam prosedur operasional tetap (SOP).3. Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan.4. Peta proses bisnis dan Prosedur operasional telah dievaluasi dan disesuaikan dengan perkembangan tuntutan efisiensi, dan efektivitas birokrasi.5. Sudah memiliki rencana pengembangan e-government di lingkungan instansi

ELEMEN REFORMASI BIROKRASI MA

PROGRAM	PENJELASAN
Penataan Tata Laksana	<ol style="list-style-type: none">1. Telah memiliki peta proses bisnis yang sesuai dengan tugas dan fungsi.2. Peta proses bisnis sudah dijabarkan ke dalam prosedur operasional tetap (SOP).3. Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan.4. Peta proses bisnis dan Prosedur operasional telah dievaluasi dan disesuaikan dengan perkembangan tuntutan efisiensi, dan efektivitas birokrasi.5. Sudah memiliki rencana pengembangan e-government di lingkungan instansi.6. Sudah dilakukan pengembangan e-government di lingkungan internal dalam rangka mendukung proses birokrasi (misal: intranet, sistem perencanaan dan penganggaran, sistem data base SDM, dll).7. Sudah dilakukan pengembangan e-government untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat (misal: website untuk penyediaan informasi kepada masyarakat, sistem pengaduan).

ELEMEN REFORMASI BIROKRASI MA

47

PROGRAM	PENJELASAN
Penataan Tata Laksana	<ol style="list-style-type: none">8. Sudah dilakukan pengembangan e-government untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dalam tingkatan transaksional (masyarakat dapat mengajukan perijinan melalui website, melakukan pembayaran, dll).9. Adanya kebijakan pimpinan tentang keterbukaan informasi publik (identifikasi informasi yang dapat diketahui oleh publik dan mekanisme penyampaian).10. Menerapkan kebijakan keterbukaan informasi publik.11. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik.
Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur	<ol style="list-style-type: none">1. Analisis jabatan dan analisis beban kerja telah dilakukan kepada seluruh jabatan.2. Perhitungan kebutuhan pegawai telah dilakukan.3. Rencana redistribusi pegawai telah disusun dan diformalkan.4. Proyeksi kebutuhan 5 tahun telah disusun dan diformalkan.5. Perhitungan formasi jabatan yang menunjang kinerja utama instansi telah dihitung dan diformalkan.

ELEMEN REFORMASI BIROKRASI MA

PROGRAM	PENJELASAN
Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur	<ol style="list-style-type: none">6. Pengumuman penerimaan diinformasikan secara luas kepada masyarakat.7. Pendaftaran dapat dilakukan dengan mudah, cepat dan pasti (online).8. Persyaratan jelas, tidak diskriminatif.9. Proses seleksi transparan, objektif, adil, akuntabel dan bebas KKN.10. Pengumuman hasil seleksi diinformasikan secara terbuka.11. Telah ada standar kompetensi jabatan.12. Telah dilakukan asesment pegawai.13. Telah diidentifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi.14. Telah disusun rencana pengembangan kompetensi dengan dukungan anggaran yang mencukupi.15. Telah dilakukan pengembangan pegawai berbasis kompetensi sesuai dengan rencana dan kebutuhan pengembangan kompetensi.

ELEMEN REFORMASI BIROKRASI MA

49

PROGRAM	PENJELASAN
Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur	<ol style="list-style-type: none">16. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi pengembangan pegawai berbasis kompetensi secara berkala.17. Kebijakan promosi terbuka telah ditetapkan.18. Promosi terbuka pengisian jabatan pimpinan tinggi telah dilaksanakan.19. Promosi terbuka dilakukan secara kompetitif dan obyektif.20. Promosi terbuka dilakukan oleh panitia seleksi yang independen.21. Hasil setiap tahapan seleksi diumumkan secara terbuka.22. Penerapan Penetapan kinerja individu.23. Terdapat penilaian kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi .24. Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya.25. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik.

ELEMEN REFORMASI BIROKRASI MA

PROGRAM	PENJELASAN
Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur	<ul style="list-style-type: none">26. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas pencapaian kinerja individu.27. Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pengembangan karir individu.28. Capaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian tunjangan kinerja.29. Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi telah ditetapkan.30. Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi telah diimplementasikan.31. Adanya monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi.32. Adanya pemberian sanksi dan imbalan (reward).33. Informasi faktor jabatan telah disusun.34. Peta jabatan telah ditetapkan.35. Kelas jabatan telah ditetapkan.36. Sistem informasi kepegawaian telah dibangun sesuai kebutuhan.37. Sistem informasi kepegawaian dapat diakses oleh pegawai.38. Sistem informasi kepegawaian terus dimutakhirkan.39. Sistem informasi kepegawaian digunakan sebagai pendukung pengambilan kebijakan manajemen SDM.

ELEMEN REFORMASI BIROKRASI MA

PROGRAM	PENJELASAN
Penguatan Akuntabilitas	<ol style="list-style-type: none">1. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Renstra2. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Penetapan Kinerja.3. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala.4. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja.5. Apakah pedoman akuntabilitas kinerja telah disusun.6. Sistem Pengukuran Kinerja telah dirancang berbasis elektronik.7. Sistem Pengukuran Kinerja dapat diakses oleh seluruh unit.8. Pemutakhiran data kinerja dilakukan secara berkala.

ELEMEN REFORMASI BIROKRASI MA

PROGRAM	PENJELASAN
Penguatan Pengawasan	<ol style="list-style-type: none">1. Telah terdapat kebijakan penanganan gratifikasi.2. Telah dilakukan public campaign.3. Penanganan gratifikasi telah diimplementasikan.4. Telah dilakukan evaluasi atas kebijakan penanganan gratifikasi.5. Hasil evaluasi atas penanganan gratifikasi telah ditindaklanjuti.6. Telah terdapat peraturan Pimpinan organisasi tentang SPIP.7. Telah dibangun lingkungan pengendalian.8. Telah dilakukan penilaian risiko atas organisasi.

ELEMEN REFORMASI BIROKRASI MA

PROGRAM	PENJELASAN
Penguatan Pengawasan	<ol style="list-style-type: none">9. Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi.10. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait.11. Telah dilakukan pemantauan pengendalian intern.12. Telah disusun kebijakan pengaduan masyarakat.13. Penanganan pengaduan masyarakat telah diimplementasikan.14. Hasil penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti.15. Telah dilakukan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat.16. Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti.17. Telah terdapat Whistle Blowing System.18. Whistle Blowing System telah disosialisasikan.19. Whistle Blowing System telah diimplementasikan.20. Telah dilakukan evaluasi atas Whistle Blowing System.

ELEMEN REFORMASI BIROKRASI MA

PROGRAM	PENJELASAN
Penguatan Pengawasan	<ol style="list-style-type: none">21. Hasil evaluasi atas Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti.22. Telah terdapat Penanganan Benturan Kepentingan.23. Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan.24. Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan.25. Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan.26. Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti.27. Telah dilakukan penancangan zona integritas.28. Telah ditetapkan unit yang akan dikembangkan menjadi zona integritas.29. Telah dilakukan pembangunan zona integritas.30. Telah dilakukan evaluasi atas zona integritas yang telah ditentukan.31. Telah terdapat unit kerja yang ditetapkan sebagai “menuju WBK/WBBM”

ELEMEN REFORMASI BIROKRASI MA

PROGRAM	PENJELASAN
Penguatan Pengawasan	<ol style="list-style-type: none">32. Rekomendasi APIP didukung dengan komitmen pimpinan.33. APIP didukung dengan SDM yang memadai secara kualitas dan kuantitas.34. APIP didukung dengan anggaran yang memadai.35. APIP berfokus pada client dan audit berbasis risiko.
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	<ol style="list-style-type: none">1. Telah terdapat kebijakan standar pelayanan.2. Standar pelayanan telah dimaklumkan.3. Terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan.4. Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan.5. Dilakukan reviu dan perbaikan atas SOP.6. Telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima (contoh: kode etik, estetika, capacity building, pelayanan prima).7. Informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media.

ELEMEN REFORMASI BIROKRASI MA

56

PROGRAM	PENJELASAN
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	<ol style="list-style-type: none">8. Telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standarStandar pelayanan telah dimaklumkan.9. Telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi.10. Terdapat inovasi pelayanan.11. Terdapat media pengaduan pelayanan.12. Terdapat SOP pengaduan pelayanan.13. Terdapat unit yang mengelola pengaduan pelayanan.14. Telah dilakukan tindak lanjut atas seluruh pengaduan pelayanan untuk perbaikan kualitas pelayanan.15. Telah dilakukan evaluasi atas penanganan keluhan / masukan.16. Dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan.17. Hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka.18. Dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat.

ELEMEN REFORMASI BIROKRASI MA

PROGRAM	PENJELASAN
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	<ol style="list-style-type: none">19. Telah memiliki rencana penerapan teknologi informasi dalam pemberian pelayanan.20. Telah menerapkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan.21. Telah dilakukan perbaikan secara terus menerus.

ELEMEN REFORMASI BIROKRASI MA

58

HASIL	PENJELASAN
Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	<ol style="list-style-type: none">1. Nilai Akuntabilitas Kinerja. (Diisi dengan nilai hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)).2. Nilai Kapasitas Organisasi (Survei Internal) . (Diisi dengan nilai hasil Survei Internal Kapasitas Organisasi).
Rencana Aksi	<ul style="list-style-type: none">• Peningkatan akuntabilitas kinerja melalui FGD dan pelatihan penyusunan LAKIP.• Peningkatan pelayanan peradilan melalui sertifikasi ISO 9001:2008.• Pelayanan publik melalui pembentukan pos bakum, sistem pengadilan anak dan mediasi.

ELEMEN REFORMASI BIROKRASI MA

59

HASIL	PENJELASAN
PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN Rencana Aksi	<p>1.Nilai Persepsi Korupsi (Survei Eksternal). (Diisi dengan nilai hasil Survei Eksternal atas Persepsi Korupsi)/</p> <p>2.Opini BPK. (Diisi dengan Opini BPK atas Laporan Keuangan).</p> <ul style="list-style-type: none">•Menindaklanjuti seluruh Rekomendasi BPK, meminimalisir potensi temuan dan mempertahankan opini WTP.
Kualitas Pelayanan Publik Rencana Aksi	<p>1.Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal). (Diisi dengan Nilai Hasil Survei Eksternal Kualitas Pelayanan).</p> <ul style="list-style-type: none">•Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pendidikan dan pelatihan.

PERKEMBANGAN REFORMASI BIROKRASI MA (KEUNGGULAN)

Menyelesaikan Program Quick Wins, berupa : Transparansi Putusan, Pengembangan Teknologi Informasi, Pengelolaan PNBPN, Kode Etik Hakim, Analisa dan Evaluasi Pekerjaan.

Menerima Tunjangan Kinerja Sebesar 70% Sejak Tahun 2008 Berdasarkan PerPres Nomor 19 Tahun 2008.

Terbitnya Surat Keputusan Nomor : 071/KMA/SK/V/2008 Tertanggal 14 Mei 2008 Tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus

MA Berhasil Mengupload Lebih Dari 10.000 Putusan Melalui Situs Direktori Putusan

Mengembangkan Website di Lebih Dari 250 Pengadilan

PERKEMBANGAN REFORMASI BIROKRASI MA (KEUNGGULAN)



Mengelola PNBP, Biaya Perkara yang Diumumkan dan Pembayaran Langsung ke Bank.



Melakukan Sosialisasi dan Internalisasi Kode Etik Hakim Pada Lebih Dari 2.000 Orang



Merumuskan Uraian Pekerjaan Untuk Sebanyak 875 Posisi



Merumuskan 26 grading (Hays System)

ANALISIS PEMECAHAN MASALAH-SWOT

INTERNAL

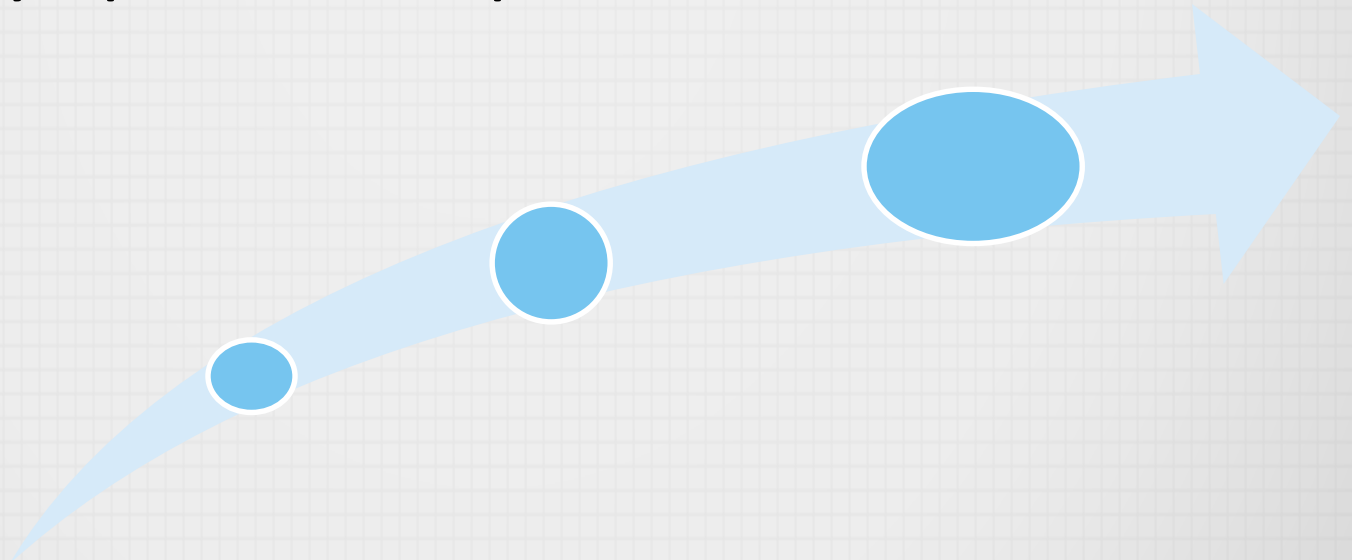
- STRENGTH/KEKUATAN
- WEAKNESS/KELEMAHAN

EKSTERNAL

- OPPORTUNITIES/PELUANG
- THREATS/ANCAMAN

VISI MISI ESSELON 1 = VISI MISI MA = NAWACITA

- Visi dan Misi ESSELON 1 = Visi Misi MA = Blue Print MA dan tentunya mendukung Program Pemerintah, yaitu sesuai dengan Agenda (*NawaCita*) Presiden dan Wakil Presiden RI, khususnya poin 2 dan poin 4 & 8



**MEWUJUDKAN BADAN PERADILAN YANG AGUNG,
MANDIRI, BERKEADILAN, TRANSPARAN & KREDIBEL
MELALUI REFORMASI BIROKRASI**

Disajikan oleh :

JEANNY HV HUTAURUK, SE, MM, AK, CA

Dalam rangka Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Esln II.a)



BERSATU KITA TEGUH-BERCERAI KITA RUNTUH

TERIMA KASIH

Tiada sukses tanpa perjuangan